



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

13. Peraturan.....

- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
- 14 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 48);
- 15 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 38);
- 16 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 14);
- 17 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 74) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 19, angka 20, dan angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
9. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
10. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

11. Desa.....

11. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
12. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
13. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

20. Bantuan.....

20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi sebagian Kuasa Bendahara Umum Negara.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat Bulan Januari sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat Bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat Bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. surat kuasa.....

2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. Tahap III berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa.
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (6) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I pertama kali.
 - (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, angka 3 dan angka 4 angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (11) Dokumen Elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

3. Diantara.....

3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 11A, 11B dan Pasal 11C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan tambahan ketentuan:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus).
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus).
 - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus).
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

c. Tahap III.....

- c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

Pasal 11B

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. tahap III berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) Berdasarkan.....

- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk melakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11C

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus).
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus).
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):

a. Penyaluran.....

- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus).
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Buapti kepada KPPN.
4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 14A dan Pasal 14B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019*, antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 14B.....

Pasal 14B

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5. Ketentuan.....

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
 - (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
 - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
 - (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait.
7. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14B ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

(3) Hasil.....

- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
8. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

9. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 18A dan Pasal 18B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua Bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir Bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa Tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat Bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa dana di RKUD Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir Bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir Bulan Desember 2020.

(6) Dalam.....

- (6) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (7) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 18B

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. terhadap Desa yang telah salur tahap II, penghitungan sisa Dana Desa Tahun 2019 di RKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
 - b. terhadap permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - 1) yang telah diajukan oleh Bupati ke KPPN; dan
 - 2) yang telah disampaikan oleh Bupati kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
10. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 19 Mei 2020

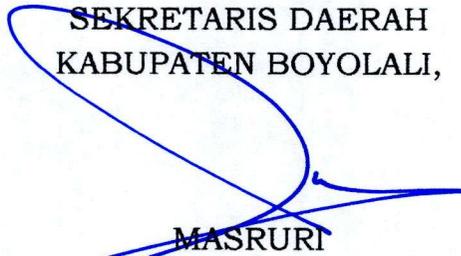
BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 23

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 23 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA KECAMATAN DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
1	2	3	4	5	6	7
	SELO					
1	Tlogolele	651,999,000	0	144,096,000	160,926,000	957,021,000
2	Klakah	651,999,000	0	0	191,057,000	843,056,000
3	Jrakah	651,999,000	0	0	271,269,000	923,268,000
4	Lencoh	651,999,000	0	0	205,180,000	857,179,000
5	Suroteleng	651,999,000	0	0	131,684,000	783,683,000
6	Samiran	651,999,000	0	0	149,273,000	801,272,000
7	Selo	651,999,000	0	0	146,778,000	798,777,000
8	Tarubatang	651,999,000	0	0	142,204,000	794,203,000
9	Senden	651,999,000	0	0	132,050,000	784,049,000
10	Jeruk	651,999,000	0	0	196,575,000	848,574,000
	AMPEL					
11	Tanduk	651,999,000	0	0	189,519,000	841,518,000
12	Banyuanyar	651,999,000	0	0	127,034,000	779,033,000
13	Sidomulyo	651,999,000	0	0	174,652,000	826,651,000
14	Ngargosari	651,999,000	0	0	142,280,000	794,279,000
15	Selodoko	651,999,000	0	0	176,261,000	828,260,000
16	Ngenden	651,999,000	0	0	117,939,000	769,938,000
17	Ngampon	651,999,000	0	0	118,093,000	770,092,000
18	Gondangslamet	651,999,000	0	0	120,124,000	772,123,000
19	Candi	651,999,000	0	0	201,286,000	853,285,000
20	Urutsewu	651,999,000	0	0	166,679,000	818,678,000
	CEPOGO					
21	Wonodoyo	651,999,000	0	0	164,975,000	816,974,000
22	Jombang	651,999,000	0	0	132,922,000	784,921,000
23	Gedangan	651,999,000	0	0	186,150,000	838,149,000
24	Sumbing	651,999,000	0	0	158,606,000	810,605,000
25	Paras	651,999,000	0	0	76,237,000	728,236,000
26	Jelok	651,999,000	0	0	257,102,000	909,101,000
27	Bakulan	651,999,000	0	0	104,031,000	756,030,000
28	Candigatak	651,999,000	0	0	143,427,000	795,426,000
29	Cabeankunti	651,999,000	0	0	160,476,000	812,475,000
30	Mliwis	651,999,000	0	0	187,087,000	839,086,000
31	Sukabumi	651,999,000	0	0	114,344,000	766,343,000
32	Genting	651,999,000	0	0	129,009,000	781,008,000
33	Cepogo	651,999,000	0	0	276,101,000	928,100,000
34	Kembangkuning	651,999,000	0	0	200,520,000	852,519,000
35	Gubug	651,999,000	0	0	142,438,000	794,437,000
	MUSUK					
36	Pagerjurang	651,999,000	0	0	76,829,000	728,828,000
37	Sukorejo	651,999,000	0	0	228,768,000	880,767,000
38	Sruni	651,999,000	0	0	146,883,000	798,882,000
39	Cluntang	651,999,000	0	0	166,108,000	818,107,000
40	Kembangsari	651,999,000	0	0	166,554,000	818,553,000
41	Ringinlarik	651,999,000	0	0	127,957,000	779,956,000
42	Kebongulo	651,999,000	0	0	102,327,000	754,326,000
43	Musuk	651,999,000	0	0	208,750,000	860,749,000
44	Sukorame	651,999,000	0	144,096,000	151,341,000	947,436,000
45	Pusporenggo	651,999,000	0	0	130,582,000	782,581,000

1	2	3	4	5	6	7
	BOYOLALI					
46	Karanggeneng	651,999,000	0	0	225,338,000	877,337,000
47	Winong	651,999,000	0	0	208,946,000	860,945,000
48	Penggung	651,999,000	0	0	207,698,000	859,697,000
49	Kiringan	651,999,000	0	0	153,000,000	804,999,000
50	Mudal	651,999,000	0	0	182,385,000	834,384,000
51	Kebonbimo	651,999,000	0	0	97,724,000	749,723,000
	MOJOSONGO					
52	Madu	651,999,000	0	0	92,105,000	744,104,000
53	Singosari	651,999,000	0	0	137,427,000	789,426,000
54	Tambak	651,999,000	0	0	171,001,000	823,000,000
55	Manggis	651,999,000	0	0	243,160,000	895,159,000
56	Jurug	651,999,000	0	0	179,959,000	831,958,000
57	Karangnongko	651,999,000	0	0	123,896,000	775,895,000
58	Butuh	651,999,000	0	0	101,526,000	753,525,000
59	Kragilan	651,999,000	0	0	200,501,000	852,500,000
60	Brajan	651,999,000	0	0	122,002,000	774,001,000
61	Metuk	651,999,000	0	0	192,789,000	844,788,000
62	Dlingo	651,999,000	0	0	179,543,000	831,542,000
	TERAS					
63	Kopen	651,999,000	0	0	116,048,000	768,047,000
64	Doplang	651,999,000	0	0	136,593,000	788,592,000
65	Kadireso	651,999,000	0	0	111,349,000	763,348,000
66	Ncpen	651,999,000	0	0	87,477,000	739,476,000
67	Sudimoro	651,999,000	0	0	94,291,000	746,290,000
68	Bangsalan	651,999,000	0	144,096,000	127,803,000	923,898,000
69	Salakan	651,999,000	0	144,096,000	147,153,000	943,248,000
70	Teras	651,999,000	0	0	154,314,000	806,313,000
71	Randusari	651,999,000	0	0	157,293,000	809,292,000
72	Mojolegi	651,999,000	0	0	119,745,000	771,744,000
73	Gumukrejo	651,999,000	0	0	120,567,000	772,566,000
74	Tawang Sari	651,999,000	0	0	131,480,000	783,479,000
75	Krasak	651,999,000	0	0	146,707,000	798,706,000
	SAWIT					
76	Kateguhan	651,999,000	0	0	110,105,000	762,104,000
77	Manjung	651,999,000	0	0	122,067,000	774,066,000
78	Gombang	651,999,000	0	0	82,419,000	734,418,000
79	Tegalrejo	651,999,000	0	0	133,710,000	785,709,000
80	Tlawong	651,999,000	0	0	121,036,000	773,035,000
81	Jenengan	651,999,000	0	0	121,822,000	773,821,000
82	Cepokosawit	651,999,000	0	0	86,674,000	738,673,000
83	Kemasan	651,999,000	0	0	123,102,000	775,101,000
84	Jatirejo	651,999,000	0	0	118,382,000	770,381,000
85	Bendosari	651,999,000	0	0	110,182,000	762,181,000
86	Karangduren	651,999,000	0	0	65,013,000	717,012,000
87	Guwokajen	651,999,000	0	0	130,078,000	782,077,000
	BANYUDONO					
88	Dukuh	651,999,000	0	0	121,905,000	773,904,000
89	Jipangan	651,999,000	0	0	142,437,000	794,436,000
90	Jembungan	651,999,000	0	0	155,425,000	807,424,000
91	Sambon	651,999,000	0	0	140,569,000	792,568,000
92	Kuwiran	651,999,000	0	0	127,841,000	779,840,000
93	Cangkringan	651,999,000	0	0	101,776,000	753,775,000
94	Ngaru-aruru	651,999,000	0	0	86,052,000	738,051,000
95	Bendan	651,999,000	0	0	121,378,000	773,377,000
96	Ketaon	651,999,000	0	0	122,155,000	774,154,000
97	Banyudono	651,999,000	0	0	127,243,000	779,242,000
98	Batan	651,999,000	0	0	88,765,000	740,764,000
99	Denggungan	651,999,000	0	144,096,000	135,203,000	931,298,000
100	Bangak	651,999,000	0	0	109,780,000	761,779,000
101	Trayu	651,999,000	0	0	105,804,000	757,803,000
102	Tanjungsari	651,999,000	0	0	123,714,000	775,713,000



1	2	3	4	5	6	7
	SAMBI					
103	Canden	651,999,000	0	0	193,138,000	845,137,000
104	Senting	651,999,000	0	0	124,463,000	776,462,000
105	Tempursari	651,999,000	0	0	132,807,000	784,806,000
106	Jatisari	651,999,000	0	0	118,470,000	770,469,000
107	Glintang	651,999,000	0	0	132,996,000	784,995,000
108	Catur	651,999,000	0	0	99,555,000	751,554,000
109	Tawengan	651,999,000	0	0	122,264,000	774,263,000
110	Sambi	651,999,000	0	0	123,993,000	775,992,000
111	Demangan	651,999,000	0	0	154,409,000	806,408,000
112	Kepoh	651,999,000	0	0	149,347,000	801,346,000
113	Jagoan	651,999,000	0	0	185,333,000	837,332,000
114	Babadan	651,999,000	0	0	142,877,000	794,876,000
115	Ngaglik	651,999,000	0	0	149,910,000	801,909,000
116	Trosobo	651,999,000	0	0	141,431,000	793,430,000
117	Cermo	651,999,000	0	0	131,059,000	783,058,000
118	Nglembu	651,999,000	0	0	123,852,000	775,851,000
	NGEMPLAK					
119	Ngargorejo	651,999,000	0	0	178,121,000	830,120,000
120	Sobokerto	651,999,000	0	144,096,000	225,539,000	1,021,634,000
121	Ngesrep	651,999,000	0	0	186,736,000	838,735,000
122	Gagaksipat	651,999,000	0	0	210,423,000	862,422,000
123	Donohudan	651,999,000	0	0	210,172,000	862,171,000
124	Sawahan	651,999,000	0	144,096,000	286,653,000	1,082,748,000
125	Pandeyan	651,999,000	0	144,096,000	210,025,000	1,006,120,000
126	Kismoyoso	651,999,000	0	0	253,387,000	905,386,000
127	Dibal	651,999,000	0	0	209,443,000	861,442,000
128	Sindon	651,999,000	0	0	223,570,000	875,569,000
129	Manggung	651,999,000	0	0	270,038,000	922,037,000
130	Girioto	651,999,000	0	0	226,420,000	878,419,000
	NOGOSARI					
131	Kenteng	651,999,000	0	0	171,226,000	823,225,000
132	Potronayan	651,999,000	0	0	194,795,000	846,794,000
133	Sembungan	651,999,000	0	0	215,452,000	867,451,000
134	Jeron	651,999,000	0	0	183,155,000	835,154,000
135	Ketitang	651,999,000	0	0	208,053,000	860,052,000
136	Rembun	651,999,000	0	144,096,000	160,852,000	956,947,000
137	Guli	651,999,000	0	0	235,247,000	887,246,000
138	Tegalgi	651,999,000	0	0	188,458,000	840,457,000
139	Bendo	651,999,000	0	0	144,347,000	796,346,000
140	Keyongan	651,999,000	0	0	322,275,000	974,274,000
141	Pojok	651,999,000	0	0	158,336,000	810,335,000
142	Glonggong	651,999,000	0	0	201,936,000	853,935,000
143	Pulutan	651,999,000	0	0	249,075,000	901,074,000
	SIMO					
144	Pelem	651,999,000	0	144,096,000	130,043,000	926,138,000
145	Bendungan	651,999,000	0	0	135,831,000	787,830,000
146	Temon	651,999,000	0	0	183,578,000	835,577,000
147	Teter	651,999,000	0	0	172,456,000	824,455,000
148	Simo	651,999,000	0	0	157,509,000	809,508,000
149	Walen	651,999,000	0	0	188,622,000	840,621,000
150	Pentur	651,999,000	0	0	165,650,000	817,649,000
151	Gunung	651,999,000	0	0	215,472,000	867,471,000
152	Talakbroto	651,999,000	0	0	154,175,000	806,174,000
153	Kedunglengkong	651,999,000	0	0	203,760,000	855,759,000
154	Blagung	651,999,000	0	0	234,858,000	886,857,000
155	Sumber	651,999,000	0	0	181,946,000	833,945,000
156	Wates	651,999,000	0	0	227,927,000	879,926,000
	KARANGGEDE					
157	Manyaran	651,999,000	0	0	224,661,000	876,660,000
158	Sempulur	651,999,000	0	0	165,441,000	817,440,000
159	Klumpit	651,999,000	0	0	141,161,000	793,160,000
160	Pinggir	651,999,000	0	0	145,139,000	797,138,000
161	Bantengan	651,999,000	0	0	166,935,000	818,934,000

1	2	3	4	5	6	7
162	Tegalsari	651,999,000	0	0	127,218,000	779,217,000
163	Sranten	651,999,000	0	0	144,002,000	796,001,000
164	Grogolan	651,999,000	0	0	154,554,000	806,553,000
165	Mojosari	651,999,000	0	0	124,887,000	776,886,000
166	Pengkol	651,999,000	0	0	141,669,000	793,668,000
167	Karangkepoh	651,999,000	0	0	142,853,000	794,852,000
168	Sendang	651,999,000	0	0	140,849,000	792,848,000
169	Kebonan	651,999,000	0	0	116,084,000	768,083,000
170	Klari	651,999,000	0	144,096,000	133,337,000	929,432,000
171	Bangkok	651,999,000	0	144,096,000	168,228,000	964,323,000
172	Dologan	651,999,000	0	0	139,443,000	791,442,000
	KLEGO					
173	Kalangan	651,999,000	0	0	168,186,000	820,185,000
174	Sendangrejo	651,999,000	0	0	180,773,000	832,772,000
175	Tanjung	651,999,000	0	0	188,529,000	840,528,000
176	Jaten	651,999,000	0	0	108,220,000	760,219,000
177	Blumbang	651,999,000	0	0	119,302,000	771,301,000
178	Sangge	651,999,000	0	0	183,840,000	835,839,000
179	Banyuurip	651,999,000	0	0	186,502,000	838,501,000
180	Bade	651,999,000	0	0	161,269,000	813,268,000
181	Klego	651,999,000	0	144,096,000	145,727,000	941,822,000
182	Gondanglegi	651,999,000	0	0	168,623,000	820,622,000
183	Karangatak	651,999,000	0	0	118,938,000	770,937,000
184	Sumberagung	651,999,000	0	0	195,270,000	847,269,000
185	Karangmojo	651,999,000	0	0	132,396,000	784,395,000
	ANDONG					
186	Pakel	651,999,000	0	0	176,016,000	828,015,000
187	Gondangrawe	651,999,000	0	0	188,213,000	840,212,000
188	Sempu	651,999,000	0	0	280,256,000	932,255,000
189	Beji	651,999,000	0	144,096,000	198,605,000	994,700,000
190	Mojo	651,999,000	0	0	228,905,000	880,904,000
191	Senggrong	651,999,000	0	0	153,503,000	805,502,000
192	Kedungdowo	651,999,000	0	0	173,109,000	825,108,000
193	Kacangan	651,999,000	0	0	141,393,000	793,392,000
194	Andong	651,999,000	0	0	194,113,000	846,112,000
195	Munggur	651,999,000	0	0	124,745,000	776,744,000
196	Pakang	651,999,000	0	0	120,275,000	772,274,000
197	Pranggong	651,999,000	0	0	124,470,000	776,469,000
198	Kunti	651,999,000	0	0	148,118,000	800,117,000
199	Pelemrejo	651,999,000	0	0	126,567,000	778,566,000
200	Semawung	651,999,000	0	0	141,430,000	793,429,000
201	Kadipaten	651,999,000	0	144,096,000	228,469,000	1,024,564,000
	KEMUSU					
202	Watugede	651,999,000	0	0	190,402,000	842,401,000
203	Kedungrejo	651,999,000	0	0	164,258,000	816,257,000
204	Sarimulyo	651,999,000	0	0	114,304,000	766,303,000
205	Klewor	651,999,000	0	0	106,749,000	758,748,000
206	Bawu	651,999,000	0	0	232,928,000	884,927,000
207	Kendel	651,999,000	0	144,096,000	261,169,000	1,057,264,000
208	Kemus	651,999,000	0	0	224,890,000	876,889,000
209	Genengsari	651,999,000	0	0	193,764,000	845,763,000
210	Kedungmulyo	651,999,000	0	144,096,000	247,272,000	1,043,367,000
211	Wonoharjo	651,999,000	0	0	201,879,000	853,878,000
	WONOSEGORO					
212	Karangjati	651,999,000	0	144,096,000	269,564,000	1,065,659,000
213	Ketoyan	651,999,000	0	0	143,656,000	795,655,000
214	Bolo	651,999,000	0	144,096,000	164,747,000	960,842,000
215	Banyusri	651,999,000	0	0	188,309,000	840,308,000
216	Gosono	651,999,000	0	0	150,355,000	802,354,000
217	Wonosegoro	651,999,000	0	0	118,617,000	770,616,000
218	Bandung	651,999,000	0	0	171,093,000	823,092,000
219	Bojong	651,999,000	0	0	253,837,000	905,836,000
220	Kauman	651,999,000	0	0	164,870,000	816,869,000

1	2	3	4	5	6	7
221	Lemahireng	651,999,000	0	0	155,013,000	807,012,000
222	Guwo	651,999,000	0	0	208,695,000	860,694,000
	JUWANGI					
223	Krobokan	651,999,000	0	0	192,298,000	844,297,000
224	Ngaren	651,999,000	0	0	225,060,000	877,059,000
225	Kalimati	651,999,000	0	144,096,000	202,105,000	998,200,000
226	Kayen	651,999,000	0	0	161,471,000	813,470,000
227	Jerukan	651,999,000	0	0	147,529,000	799,528,000
228	Pilangrejo	651,999,000	0	0	198,875,000	850,874,000
229	Cerme	651,999,000	0	0	152,124,000	804,123,000
230	Juwangi	651,999,000	0	0	170,097,000	822,096,000
231	Ngleses	651,999,000	0	0	199,774,000	851,773,000
	GLADAGSARI					
232	Seboto	651,999,000	0	0	223,841,000	875,840,000
233	Kaligentong	651,999,000	0	144,096,000	168,688,000	964,783,000
234	Gladagsari	651,999,000	0	0	158,749,000	810,748,000
235	Kembang	651,999,000	0	144,096,000	243,064,000	1,039,159,000
236	Ngagrong	651,999,000	0	0	181,856,000	833,855,000
237	Candisari	651,999,000	0	0	139,244,000	791,243,000
238	Ngargoloka	651,999,000	0	144,096,000	118,951,000	915,046,000
239	Sampetan	651,999,000	0	144,096,000	301,931,000	1,098,026,000
240	Ngadirojo	651,999,000	0	0	220,873,000	872,872,000
241	Jlarem	651,999,000	0	144,096,000	184,842,000	980,937,000
	TAMANSARI					
242	Lampar	651,999,000	0	0	191,668,000	843,667,000
243	Dragan	651,999,000	0	0	159,378,000	811,377,000
244	Karanganyar	651,999,000	0	0	171,390,000	823,389,000
245	Jemowo	651,999,000	0	0	231,104,000	883,103,000
246	Sumur	651,999,000	0	0	121,903,000	773,902,000
247	Sangup	651,999,000	0	0	176,834,000	828,833,000
248	Mriyan	651,999,000	0	0	130,316,000	782,315,000
249	Lanjaran	651,999,000	0	0	133,300,000	785,299,000
250	Karangkendal	651,999,000	0	0	127,029,000	779,028,000
251	Keposong	651,999,000	0	0	184,009,000	836,008,000
	WONOSAMODRO					
252	Ngablak	651,999,000	0	0	144,769,000	796,768,000
253	Kedungpilang	651,999,000	0	0	147,531,000	799,530,000
254	Kalinanas	651,999,000	0	0	187,034,000	839,033,000
255	Gilirejo	651,999,000	0	0	151,308,000	803,307,000
256	Jatilawang	651,999,000	0	0	221,734,000	873,733,000
257	Garangan	651,999,000	0	144,096,000	231,886,000	1,027,981,000
258	Bercak	651,999,000	0	0	158,928,000	810,927,000
259	Bengle	651,999,000	0	0	283,490,000	935,489,000
260	Gunungsari	651,999,000	0	0	234,913,000	886,912,000
261	Repaking	651,999,000	0	0	268,424,000	920,423,000
Total		170,171,739,000	0	3,746,496,000	43,063,223,000	216,981,458,000

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

